

ANALISIS RISIKO POLITIK DAN KEAMANAN PT FREEPORT INDONESIA SEBAGAI DAMPAK DARI KEBIJAKAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILU 2024

Sisilia Putri^{1)*}, Qanszelir GB Pandjaitan XIV²⁾

¹⁾Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

²⁾Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

e-mail: 01043210021@student.uph.edu¹⁾, qanszelir.pandjaitan@uph.edu²⁾

ABSTRAK

Visi dan misi masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 berpotensi melahirkan perubahan regulasi, kebijakan, dan tata kelola industri tambang di Indonesia. Perubahan tersebut menimbulkan risiko politik dan keamanan bagi industri pertambangan asing, salah satunya adalah PT Freeport Indonesia dengan investasi McMoRan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak perubahan politik terhadap kestabilan operasional PT Freeport Indonesia, mengidentifikasi peran kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, serta mengusulkan alternatif kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Untuk menguraikan fenomena tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknis analisis komparatif melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya potensi risiko politik dan keamanan pada kestabilan operasional Freeport McMoRan dalam konteks *cohesiveness of government*, *strength of within-system opposition*, *rule of law*, dan *corruption*. Pengetatan regulasi pada kepemimpinan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar diproyeksikan akan mengganggu atau mengubah kondisi operasional PT Freeport Indonesia. Sementara itu, kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak menimbulkan dampak yang signifikan bagi Freeport - McMoran. Adapun, penekanan regulasi tata kelola pada kepemimpinan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menimbulkan ketidakpastian bagi industri tambang dan investasi di Papua. Regulasi kepemimpinan mendatang menjanjikan perubahan positif bagi pembangunan dan lingkungan di Indonesia, tetapi perubahan kebijakan yang terlalu drastis dapat berdampak negatif bagi perusahaan tambang dan investasi jangka panjang.

Kata kunci: Analisis Risiko Politik dan Keamanan, Industri Pertambangan, Freeport McMoran, Analisis Komparatif, Pemilu 2024

ABSTRACT

The visions and missions of each presidential and vice-presidential candidate pair in the 2024 elections have the potential to create changes in regulations, policies, and governance of the mining industry in Indonesia. These changes pose political and security risks for foreign mining industries, one of which is PT Freeport Indonesia with McMoRan investments. This study aims to explore the impact of political change on the operational stability of PT Freeport Indonesia, identify the role of government policy in addressing economic inequality, and propose more inclusive and sustainable policy alternatives. To spell out the phenomenon, the researcher used qualitative research methods with comparative analysis techniques through documentation studies. The results show there are potential political and security risks to Freeport McMoRan's operational stability in the context of cohesiveness of government, strength of within-system opposition, rule of law, and corruption. The tightening of regulations under the leadership of Anies Baswedan and Muhaimin Iskandar are projected to disrupt or change the operational conditions of PT Freeport Indonesia. Meanwhile, the leadership of Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka are not considered to have a significant impact on Freeport-McMoran. Meanwhile, the emphasis on governance regulations under the leadership of Ganjar Pranowo and Mahfud MD will inflict uncertainty for the mining industry and investment in Papua. The upcoming leadership regulations promise positive changes for development and the environment in Indonesia, but too drastic policy changes could negatively impact the mining companies and the long-term investments.

Keywords: Political and Security Risks Analysis, Mining Industry, Freeport McMoran, Comparative Analysis, 2024 Election

1. Pendahuluan

Freeport-McMoRan adalah perusahaan global yang bergerak di sektor pertambangan dengan fokus utama pada tambang tembaga dan emas. Salah satu anak perusahaannya, PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia atau PTFI merupakan bagian dari Freeport- McMoRan & Gold Company (FCX), sebuah perusahaan pertambangan Amerika Serikat yang aktif sejak April 1967. PTFI, afiliasi langsung dari Freeport, berfokus pada eksplorasi, penambangan, dan pemrosesan mineral seperti tembaga, emas, dan perak di Provinsi Papua, Indonesia. Lokasi operasi utama perusahaan ini adalah di Kabupaten Mimika, Papua, yang dikenal dengan sebutan tambang Grasberg, sebuah sumber daya alam berharga dan salah satu tambang terbesar di dunia. Operasinya memberikan kontribusi besar pada ekonomi Indonesia, namun juga menimbulkan kontroversi terkait dampak lingkungan, sosial, dan keamanan (Rahayu, et.al., 2022).

Perusahaan McMoran, memiliki kendali atas PT Freeport Indonesia sejak mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia pada tahun 1967. Konflik muncul seiring waktu, terutama seputar perjanjian kontrak karya yang mengatur operasi tambang Grasberg. Salah satu permasalahannya adalah pembagian keuntungan, tanggung jawab lingkungan, dan keterlibatan perusahaan terhadap masyarakat lokal. Investasi McMoRan, yang kemudian bergabung dengan Freeport, adalah dasar utama untuk ekspansi mereka dalam industri pertambangan di Indonesia, terutama terkait tambang Grasberg (Ramadhani, 2022). Ini membuat mereka memiliki peranan dominan dalam sektor pertambangan, menghasilkan kontribusi ekonomi yang besar, tetapi juga memunculkan kontroversi terkait cara mereka menjalankan operasi. Freeport-McMoRan dan investasi McMoRan di Indonesia, melalui PT Freeport Indonesia, mencerminkan pentingnya investasi asing di sektor pertambangan. Operasinya menjadi pusat perhatian karena dampak ekonomi

yang besar dan dampaknya pada lingkungan hidup, sementara juga menjadi sumber konflik terkait isu-isu hak, keadilan, dan lingkungan.

Keberadaan Freeport di Papua menimbulkan sejumlah kontroversi. Beberapa pelanggaran terjadi di Indonesia, termasuk klaim kompensasi atas tanah masyarakat, dampak lingkungan dari kegiatan eksplorasi tambang, isu terkait kontrak karya serta ketidaksetaraan antara pekerja asing dan lokal, terutama pekerja dari Papua. Konflik antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan ini berlanjut menciptakan ketegangan dan konflik. Isu lingkungan kerap menjadi sorotan utama karena operasi tambang ini berdampak besar pada ekosistem Papua. Di samping itu, masalah hak asasi manusia dan tuntutan pemberdayaan masyarakat setempat juga menjadi perhatian penting, mengingat dampaknya pada komunitas di sekitar tambang.

Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo memunculkan potensi perubahan dalam regulasi, kebijakan, dan tata kelola industri tambang di Indonesia. Kebijakan-kebijakan baru, terutama terkait lingkungan, peraturan investasi, dan konsesi operasional, bisa menjadi fokus utama bagi pemerintah baru dalam mengatur sektor ini. Hal ini menimbulkan risiko politik bagi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di sektor pertambangan, termasuk Freeport-McMoRan. Selain risiko politik, risiko keamanan juga menjadi perhatian utama. Wilayah Papua di Indonesia telah mengalami ketegangan dan konflik sosial yang terkait dengan operasi tambang, terutama terkait hak dan keadilan sosial, ekonomi, serta hak-hak adat masyarakat lokal. Kestabilan keamanan di wilayah ini mempengaruhi kelangsungan operasional perusahaan-perusahaan tambang.

Investasi Freeport McMoRan (FCX) di PT Freeport Indonesia (PTFI) mencakup beberapa proyek yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pengembangan perusahaan. Pada Oktober 2023, Presiden

Joko Widodo dan *Chairman* Freeport McMoran, Richard Adkerson, membahas terkait penambahan saham pemerintah sebanyak 10% di PTFI. Hal ini bertujuan untuk menggantikan pemerintah Indonesia sebagai pemilik kontrak pertambangan, yang sebelumnya diambil oleh pemerintah saat ini sebesar 49% (Muliawati, 2023). Investasi ini bertujuan untuk memperluas pengembangan proyek di Tambang Grasberg, termasuk pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit berbasis gas, yang rencananya akan menggantikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu. Freeport-McMoRan Inc. (FCX) bersama dengan PTFI membangun negosiasi untuk mendapatkan perpanjangan kontrak selepas tenggat konsesi 2041 di Kucing Liar. Rencana investasi nol emisi karbon perseroan juga ikut jadi perhitungan sampai 2060 mendatang.

Pasca akhir periode kepemimpinan Jokowi dimulai, perubahan dalam strategi pemerintah terhadap konflik di Papua dapat berdampak pada keamanan operasional perusahaan seperti Freeport-McMoRan. Kendati ada potensi perubahan signifikan pasca-periode kepemimpinan Presiden Jokowi, hal ini juga dapat memunculkan ketidakpastian bagi perusahaan multinasional. Perubahan kebijakan yang tidak terduga atau ketidakstabilan politik dapat menyulitkan perusahaan untuk merencanakan investasi jangka panjang dan menghadapi tantangan keamanan yang lebih besar.

Pada umumnya, menjelang pemilu, terutama di negara dengan sejarah politik yang dinamis seperti Indonesia, perusahaan multinasional sering menghadapi sejumlah risiko politik yang dapat memengaruhi investasi mereka. Adapun PT Freeport-McMoRan, perusahaan tambang yang memiliki keberadaan yang signifikan di Papua, Indonesia, dapat dihadapkan pada risiko-risiko berikut menjelang pemilu. Setelah pemilu terdapat kemungkinan akan ketidakpastian dalam kebijakan. Calon atau partai yang berbeda dengan visi politik yang berbeda dapat mengubah atau merevisi

kebijakan ekonomi, pajak, atau lingkungan yang pada gilirannya dapat memengaruhi Freeport. Perubahan kebijakan ini bisa mengganggu rencana bisnis dan operasional perusahaan.

Pemilu di Indonesia kerap kali memicu ketegangan politik dan sosial di berbagai daerah, termasuk tempat operasional Freeport di Papua. Ketegangan politik lokal yang meningkat bisa berdampak buruk pada hubungan antara perusahaan dan masyarakat, serta dapat menimbulkan risiko demonstrasi atau protes yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Perusahaan pertambangan sering kali terlibat dalam isu lingkungan yang sensitif. Adanya perubahan kebijakan lingkungan pasca-pemilu dapat mempengaruhi perizinan, tuntutan lingkungan, atau aturan baru terkait keberlanjutan, yang kemudian dapat memengaruhi operasional perusahaan.

2. Tinjauan Pustaka

Dalam tulisan yang berjudul “Analisis Risiko Politik dan Keamanan PT Freeport Indonesia sebagai Dampak dari Kebijakan Calon Presiden-Wakil Presiden Pemilu 2024”, penulis menggunakan penelitian terdahulu yang menjadi landasan dari tulisan ini. Pertama, penelitian karya Rahayu, Intan, Cecep Safa’atul Berkah, dan Nurillah Jamil Achmawati Novel (2022) dengan judul “Studi Kasus Analisis Proses Negosiasi PT Freeport Dengan Pemerintah Indonesia”. Secara garis besar tulisan ini menjelaskan bagaimana proses negosiasi yang terjadi antara PT Freeport dan Pemerintah Indonesia, termasuk latar belakang, isu-isu utama yang dibahas, serta hasil kesepakatan yang dicapai. Analisis terperinci tentang bagaimana proses negosiasi tersebut mempengaruhi hubungan politik antara perusahaan tambang dan pemerintah, menjadi hal yang menarik untuk ditelusuri.

Hasil dari penelitian itu menganalisis bahwa dalam negosiasi ini pihak Indonesia berada di posisi yang diuntungkan, dapat dilihat dari tempat negosiasi yang berada di

wilayah Indonesia, sedangkan PT Freeport merupakan pihak asing yang berinvestasi di wilayah Indonesia dan belum memenuhi kebijakan izin usaha di Indonesia. Tapi di sisi lain, pihak masyarakat yang terlibat konflik di kawasan Freeport masih belum menemui titik terangnya. Proses negosiasi memakan waktu bertahun-tahun hingga pada akhirnya dapat mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi ini mampu mencapai titik temu sesuai kesepakatan dan porsinya masing-masing melalui strategi *win-win solution*. Dengan merujuk pada penelitian ini, penelitian berikutnya dapat memperoleh landasan yang kuat untuk menganalisis hubungan antara faktor politik dan kegiatan bisnis PT Freeport di Indonesia, khususnya dalam konteks negosiasi dengan pemerintah dan dampaknya terhadap risiko politik yang dihadapi perusahaan sekaligus memperoleh landasan yang kuat untuk menganalisis hubungan antara faktor politik dan kegiatan bisnis PT Freeport di Indonesia. Penelitian ini belum sepenuhnya menjelajahi dampak perubahan politik, khususnya menjelang akhir masa jabatan seorang Presiden terhadap kestabilan operasional dan strategi perusahaan seperti PT Freeport.

Oleh sebab itu tulisan ini selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana perubahan politik di tingkat nasional dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi dan regulasi, serta bagaimana perusahaan seperti PT Freeport menanggapi dan mengelola risiko yang terkait. Meskipun penelitian telah menggarisbawahi peran Freeport Indonesia dalam memperluas ketimpangan kekayaan di Indonesia, masih perlu dipelajari lebih lanjut bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia berkontribusi pada dinamika tersebut. Penelitian selanjutnya akan menggali lebih dalam tentang kebijakan politik dan ekonomi yang mendukung atau bahkan memperkuat posisi Freeport Indonesia dalam ekonomi Indonesia setelah berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Jokowi.

Penelitian kedua, berjudul "Kajian Kasus Freeport Sebagai Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Menggunakan

Pendekatan Neomarxisme" yang ditulis oleh Alfina Novia Ramadhani. Tulisan ini menganalisis ketimpangan pendapatan di Indonesia, khususnya terkait dengan peran PT Freeport. Tulisan oleh Alfina dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana kesenjangan ekonomi mempengaruhi dinamika hubungan antara perusahaan dan pemerintah. Penelitian ini menganalisis kasus ketimpangan pendapatan di Indonesia, khususnya terkait dengan peran PT Freeport. Perspektif Neomarxisme memberikan perhatian terhadap bagaimana kapitalisme dan kebangkitan Freeport Indonesia telah menyebabkan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan pada kelompok yang lebih kecil. Dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal dan menguasai sumber daya alam negara, Freeport Indonesia telah berperan dalam memperluas kesenjangan kekayaan di Indonesia. Studi kasus ini menggambarkan bagaimana Freeport-McMoran telah menerima manfaat yang tidak proporsional dari situasi tersebut, yang lebih memperkuat pembagian sosial yang ada dan mendorong komunitas lokal ke pinggiran. Perspektif Neomarxisme menyoroti biaya sosial dan ekologis dari ketimpangan ekonomi untuk memberikan pemahaman yang dalam tentang dinamika ketimpangan ekonomi dan implikasinya terhadap masyarakat dan lingkungan di Indonesia.

Meskipun kedua penelitian ini memberikan pengetahuan yang berharga, masih ada beberapa aspek yang belum tercakup sepenuhnya. Misalnya, peran kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi dinamika hubungan antara perusahaan dan pemerintah, serta alternatif kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. Penelitian selanjutnya yang dilakukan penulis diharapkan dapat mengisi celah ini dengan melakukan eksplorasi lebih lanjut tentang dampak perubahan politik terhadap kestabilan operasional PT Freeport, serta mengidentifikasi peran kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, dan mengusulkan alternatif kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian,

penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman tentang dinamika politik dan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam konteks PT Freeport.

3. Metode Penelitian

Pada tulisan ini digunakan pendekatan kualitatif. Penulis memanfaatkan data sekunder berupa laporan berita, jurnal, artikel, dan lainnya, dengan metode pengumpulan data dokumentasi yang merupakan suatu cara untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip dan laporan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2018).

Tujuan yang ingin dicapai ialah memahami fenomena perubahan dinamika politik, khususnya setelah pergantian masa jabatan Presiden Jokowi. Dalam rangka mendukung penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif komparatif untuk membandingkan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda (Sugiyono, 2012). Fokus dari penelitian ini yaitu, untuk melihat bagaimana visi dan misi pasangan calon presiden-wakil presiden Pemilu 2024 menggambarkan kemungkinan perubahan kebijakan dalam konteks industri pertambangan, yang dapat memberikan dampak terhadap kestabilan PT Freeport Indonesia. Penulis akan membandingkan risiko politik dan keamanan Indonesia di bawah kepemimpinan ketiga Capres-Cawapres Pemilu 2024, dalam aspek *Cohesiveness of Government*, *Strength of Within-System Opposition*, *Rule of Law*, dan *Corruption*.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pengaruh Kebijakan Politik dan Keamanan Pemerintah Terhadap PT Freeport

Kebijakan politik dan keamanan yang diimplementasikan oleh pemerintah setelah pemilihan presiden 2024 akan sangat memengaruhi keberlangsungan bisnis perusahaan seperti PT Freeport Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan ini perlu memperhatikan dengan saksama calon

presiden dan wakil presiden yang berkomitmen untuk menciptakan kondisi politik dan keamanan yang stabil dan kondusif bagi investasi asing. Selain itu, kebijakan lingkungan dan perizinan tambang juga akan menjadi fokus utama perhatian perusahaan ini. Calon presiden dan wakil presiden yang akan menjadi pemimpin Indonesia setelah tahun 2024 diharapkan memiliki kebijakan yang berkelanjutan terkait lingkungan dan mampu menciptakan peraturan perizinan yang mendukung kelangsungan operasional perusahaan tambang. Keberlangsungan bisnis PT Freeport Indonesia akan sangat tergantung pada kebijakan politik dan keamanan yang diterapkan setelah pemilihan presiden tuntas.

4.2. Indonesia di Bawah Kepemimpinan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Visi dan misi calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar, memiliki potensi untuk menciptakan perubahan dalam kebijakan ekonomi dan lingkungan yang dapat berdampak pada PT Freeport Indonesia dan investasi McMoRan, terutama di wilayah Papua. Anies Baswedan dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap isu lingkungan dan kesejahteraan sosial. Kehadiran Muhaimin Iskandar juga memberikan sentuhan kebijakan yang lebih inklusif dan mendorong pembangunan daerah. Visi Anies Baswedan yang lebih berfokus pada keberlanjutan lingkungan dapat memunculkan kebijakan yang lebih ketat terkait praktik tambang, terutama terkait eksploitasi sumber daya alam di Papua (*Indonesia Adil Makmur untuk Semua*, n.d.). Potensi pembatasan operasional atau pengetatan regulasi lingkungan mungkin menjadi fokusnya, yang pada gilirannya dapat mengubah kondisi operasional PT Freeport Indonesia. Ini bisa termasuk persyaratan baru terkait rehabilitasi lingkungan dan peningkatan pajak atau royalti yang dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan tambang tersebut.

Selain itu, terkait dengan *Cohesiveness of Government*, Visi dan misi yang diusung oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memerlukan tingkat kesatuan dalam pemerintahan untuk implementasinya. Konsistensi dan keselarasan dalam kebijakan antar departemen dan tingkat pemerintahan adalah kunci untuk menghadapi tantangan kompleks terkait investasi dan lingkungan di Papua (Puspadini, 2023). Kebijakan pembangunan dan kesejahteraan sosial pasangan calon ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada pembangunan di Papua. Ini mungkin termasuk dalam pemberian insentif, pembangunan infrastruktur, atau program sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dapat membawa dampak pada perkembangan wilayah dan masyarakat di sekitar wilayah operasional PT Freeport Indonesia. Namun demikian, setiap perubahan dalam kebijakan pemerintahan yang baru terpilih harus diimbangi dengan pertimbangan yang cermat terhadap kepentingan nasional dan investasi asing.

Dalam konteks *Strength of Within-System Opposition*, perubahan kebijakan yang signifikan terkait lingkungan dan investasi bisa menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang merasa kepentingan mereka terganggu. Oposisi dalam sistem politik atau dari kelompok-kelompok tertentu bisa menjadi penghalang utama dalam mewujudkan perubahan tersebut. Hal yang dapat diperkirakan ialah kemungkinan oposisi akan lebih banyak dari pada era Jokowi apabila melihat, partai yang mendukung calon pasangan ini. *Rule of Law*, implementasi kebijakan baru terkait lingkungan dan investasi, terutama yang berpotensi mempengaruhi perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia, memerlukan kepastian hukum yang kuat. Kedaulatan hukum yang konsisten, jelas, dan adil diperlukan untuk mendukung perubahan kebijakan tersebut tanpa menimbulkan ketidakpastian. Pada dasarnya, tantangan besar dalam mengubah kebijakan terkait investasi dan lingkungan adalah korupsi. Hal

ini dapat memengaruhi implementasi kebijakan yang bersifat transparan dan adil. Korupsi bisa menjadi hambatan dalam mencapai visi mereka terkait keberlanjutan lingkungan dan pembangunan sosial.

Sementara visi dan misi mereka berpotensi membawa perubahan yang positif, tertera pula dalam visi dan misi bahwa mereka memastikan setiap kebijakan terkait investasi akan konsisten dan melibatkan dunia usaha, masyarakat sipil, dan Pemerintah Daerah secara setara, saling menghormati, dan dengan tujuan yang produktif bagi Indonesia. Tidak hanya itu, mereka berupaya meningkatkan investasi di Indonesia dengan merawat investor yang sudah ada serta merangkul investor baru, di mana insentif diberikan kepada keduanya secara adil dan transparan, memastikan investasi efektif dan efisien dengan menurunkan *Incremental Capital Output Ratio* serta, meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi melalui manajemen satu pintu dalam bidang investasi untuk memastikan keberlanjutan operasional perusahaan tambang yang sudah mapan di Papua. Perubahan dalam kebijakan yang berpotensi mengganggu atau mengubah kondisi operasional perusahaan tambang tersebut membutuhkan pendekatan yang cermat dan solusi yang mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh bagi semua pihak terkait.

4.3. Indonesia di Bawah Kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Visi dan misi Prabowo Subianto-Prabowo Gibran menggambarkan potensi perubahan kebijakan ekonomi dan lingkungan yang dapat berdampak signifikan pada PT Freeport Indonesia, investasi McMoRan, dan pembangunan di Papua. Prabowo Subianto, dengan fokusnya pada kedaulatan ekonomi dan pembangunan wilayah, kemungkinan akan menerapkan kebijakan proteksionisme terhadap sumber daya alam dan pertambangan (*Bersama Indonesia Maju*, n.d.). Ini bisa melibatkan

revisi kontrak karya yang berdampak pada operasional perusahaan tambang dan bagian dari keuntungan yang dibagikan, berpotensi memengaruhi PT Freeport Indonesia. Di sisi lain, kehadiran Prabowo-Gibran, yang mewakili generasi muda, dapat membawa perspektif inovatif dalam pembangunan Papua. Dalam visi mereka, fokus pada kemandirian ekonomi daerah dan inklusi sosial menonjol. Namun, perubahan kebijakan yang drastis tanpa koordinasi yang tepat dengan para pemangku kepentingan dapat menimbulkan ketidakpastian dan risiko politik bagi investasi dan pembangunan di Papua.

Cohesiveness of Government, dapat dilihat dari upaya untuk merevisi aturan yang menghambat investasi baru di sektor energi baru dan terbarukan serta menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan menunjukkan perhatian pada aspek lingkungan. Namun, langkah-langkah ini juga harus sejalan dengan keberlanjutan operasional perusahaan tambang yang sudah mapan di Papua. Dengan adanya oposisi yang cukup kuat seperti PDIP yang merupakan partai pengusung paslon nomor 03, terdapat urgensi akan pendekatan matang dan dialog terbuka antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menyeimbangkan kedaulatan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan operasional perusahaan tambang di Papua menjadi krusial. Tindakan yang terlalu drastis tanpa mempertimbangkan konsekuensi menyeluruhnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi industri tambang dan pembangunan di wilayah tersebut. Kesenambungan dan kesatuan dalam kebijakan pemerintahan, ketahanan terhadap oposisi dalam sistem, kedaulatan hukum yang kokoh, dan pemberantasan korupsi menjadi faktor penting dalam mengimplementasikan visi mereka. Evaluasi menyeluruh terhadap dinamika pembangunan dan investasi di Papua, termasuk operasional PT Freeport Indonesia, diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis, kepentingan

masyarakat, dan perlindungan. Apabila memang pasangan calon ini menang, perubahan kebijakan investasi mungkin tidak akan berbeda secara signifikan karena beliau menekankan akan melanjutkan program kerja Presiden Jokowi, apalagi Gibran merupakan anak kandung dari Presiden Jokowi (Ayyubi, 2023). Saya rasa, apabila pasangan calon ini terpilih tidak ada kebijakan yang akan berubah signifikan terkait *cohesiveness of government, strength of within-system opposition, rule of law, dan corruption*.

4.4. Indonesia di Bawah Kepemimpinan Ganjar Pranowo-Mahfud MD

Sebagai calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD membawa visi pembangunan yang inklusif dan penekanan pada pemberdayaan ekonomi daerah (*Menuju Indonesia Unggul*, n.d.). Dalam konteks *cohesiveness of government*, visi ini dapat membawa implikasi terhadap PT Freeport Indonesia, investasi McMoRan, dan pembangunan di Papua. Ganjar Pranowo memang telah dikenal sebagai gubernur yang memprioritaskan pembangunan daerah, memfokuskan pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi tidak secara spesifik membahas investasi asing. Dalam konteks risiko politik, visi pemberdayaan ekonomi daerah yang diperjuangkan oleh Ganjar Pranowo mungkin mengakibatkan kebijakan lebih proaktif terhadap pengelolaan sumber daya alam, termasuk di Papua. Upaya untuk memastikan manfaat yang lebih merata bagi daerah-daerah sumber daya alam, termasuk pengelolaan operasional perusahaan tambang, dapat menjadi fokus utama. Ini bisa mengarah pada revisi kontrak karya dan pengaturan ulang bagi perusahaan seperti PT Freeport Indonesia. Dalam menganalisis oposisi, apabila pasangan calon ini menang, kemungkinan akan banyak oposisi yang akan bergabung, jika dilihat berdasarkan 10 tahun ke belakang PDIP berkuasa.

Selain itu, Mahfud MD yang dikenal sebagai figur yang mendorong kedaulatan

hukum dan tata kelola yang baik dapat memengaruhi kebijakan terkait kontrak dan operasional perusahaan asing. Penekanan pada tata kelola yang baik, transparansi, dan kepatuhan pada regulasi merupakan prioritas Mahfud MD. Hal ini menekankan pentingnya kedaulatan hukum dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kontrak dan operasional perusahaan asing. Dalam hal ini, akan ada penekanan pada tata kelola yang transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun demikian, upaya untuk mengatur ulang kontrak atau menyesuaikan operasional perusahaan dengan kepentingan daerah bisa menimbulkan ketidakpastian bagi industri tambang dan investasi di Papua. Perubahan kebijakan yang signifikan perlu dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Ketidakpastian dalam kebijakan dan regulasi serta korupsi yang mungkin terjadi terlalu drastis dapat berdampak negatif pada investasi dan operasional perusahaan. Pada akhirnya, visi dan misi Ganjar Pranowo-Mahfud MD terkait risiko politik pada PT Freeport Indonesia dan investasi McMoRan akan diuji dalam kemampuannya untuk menawarkan kebijakan yang seimbang antara kedaulatan daerah, keberlanjutan investasi, dan pengembangan wilayah. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak terkait tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnis dan pembangunan di Papua.

4.5. Potensi Risiko Politik dan Keamanan Bagi PT Freeport Indonesia

Gambaran visi dan misi dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia serta potensi implikasinya terhadap PT Freeport Indonesia, investasi McMoRan, dan pembangunan di Papua, menyoroti bagaimana setiap visi dan misi calon pemimpin berpotensi mengubah kebijakan ekonomi, lingkungan, dan

pembangunan di wilayah tersebut. Visi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap isu lingkungan dan pembangunan sosial. Fokus mereka pada keberlanjutan lingkungan dapat mengubah regulasi tambang yang lebih ketat dan berpotensi memengaruhi operasional PT Freeport Indonesia. Namun, fokus pada pembangunan di Papua mungkin membawa perubahan positif, diperlukan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan keberlanjutan operasional perusahaan tambang. Sementara itu, visi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencerminkan kecenderungan kebijakan yang lebih protektif terhadap sumber daya alam dan kedaulatan ekonomi. Pendekatan ini dapat membawa risiko perubahan kontrak yang dapat mengganggu operasional PT Freeport Indonesia. Namun, upaya inovatif dalam pembangunan di Papua dapat memberikan dampak positif dalam pemberdayaan ekonomi daerah, tetapi perlu diperhatikan bahwa perubahan kebijakan yang drastis tanpa koordinasi yang tepat dapat menimbulkan ketidakpastian. Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dengan visi pemberdayaan ekonomi daerah dan penegakan hukum yang baik, juga dapat membawa perubahan kebijakan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan yang lebih transparan dan sesuai dengan regulasi berpotensi mengubah operasional perusahaan tambang. Namun, ketidakpastian terkait perubahan kebijakan yang drastis juga perlu diwaspadai agar tidak mengganggu investasi dan pembangunan di Papua.

Hasil analisa ketiganya menunjukkan kemungkinan adanya perubahan kebijakan dalam konteks lingkungan dan investasi asing. Dapat dikatakan bahwa ketiganya memiliki visi dan misi yang positif bagi negara, namun tidak sepenuhnya berdampak positif bagi perusahaan. Namun, hal ini perlu dicatat bahwa visi dan misi tersebut hanya sebatas janji yang belum tentu tercermin dalam kenyataan. Sering kali setelah terpilih, implementasi kebijakan dapat berbeda dengan apa yang dijanjikan selama

kampanye. Sementara visi dan misi yang disampaikan oleh para calon memiliki aspek positif untuk pembangunan dan lingkungan di Indonesia, perlu diingat bahwa perubahan kebijakan yang terlalu drastis dapat memberikan dampak negatif pada perusahaan, terutama yang telah berinvestasi dalam jangka panjang seperti PT Freeport Indonesia. Kestabilan kebijakan sangat penting bagi kelangsungan operasional perusahaan dan kepastian bagi para investor. Selain itu, visi dan misi yang diutarakan belum tentu mencerminkan implementasi nyata di masa depan. Praktik politik yang sering terjadi adalah janji kampanye yang kemudian berubah atau tidak sepenuhnya dilaksanakan setelah memegang jabatan. Oleh karena itu, pentingnya adalah bagaimana para calon akan menerjemahkan visi dan misi mereka ke dalam kebijakan yang konsisten dan dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan.

Analisis terhadap potensi risiko *Nationalization and Expropriation* menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh kebijakan ini dalam konteks pemerintahan yang baru. Perlu diingat bahwa janji kampanye belum tentu mencerminkan kebijakan yang diimplementasikan setelah terpilih. Konsistensi antara visi kampanye dan tindakan nyata perlu diperhatikan karena perubahan kebijakan yang drastis dapat merugikan perusahaan yang telah melakukan investasi jangka panjang di Indonesia, seperti PT Freeport Indonesia. Kestabilan kebijakan menjadi krusial untuk memastikan kepercayaan investor. Selain itu, pentingnya konsistensi dan rencana yang matang dalam menerjemahkan visi dan misi menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Indonesia. Ini menyoroti bahwa terlalu sering janji kampanye tidak sepenuhnya terealisasi setelah memegang jabatan. Diperlukan kesadaran akan implikasi dari perubahan kebijakan terhadap keberlangsungan perusahaan dan investasi. Sementara visi dan misi para calon menjanjikan dampak positif dalam

pembangunan di Papua, tantangan politik yang berbeda memerlukan keseimbangan dan dialog yang baik antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mencapai kebijakan yang menguntungkan semua pihak tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnis dan pembangunan di wilayah.

5. Kesimpulan

Analisis di atas memberikan gambaran komprehensif tentang PT Freeport Indonesia, termasuk dampaknya terhadap lingkungan, isu-isu sosial, dan keamanan, serta implikasi politik dan kebijakan masa depan terhadap perusahaan tersebut. Dalam konteks pemilihan presiden yang akan datang, tiga pasangan calon menawarkan visi dan misi yang berpotensi memengaruhi perusahaan ini. Namun, kritik terhadap hal ini adalah bahwa sementara visi dan misi yang diungkapkan menjanjikan perubahan positif bagi pembangunan dan lingkungan di Indonesia, implementasinya belum tentu mencerminkan kenyataan. Pola di mana janji-janji kampanye sering kali tidak terwujud saat memegang jabatan sering kali terjadi. Oleh karena itu, penting bagi calon pemimpin untuk mengonversi visi dan misi mereka ke dalam kebijakan konkret yang konsisten dan dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Perubahan kebijakan yang terlalu drastis dapat memiliki dampak negatif bagi perusahaan, khususnya yang telah melakukan investasi dalam jangka panjang seperti PT Freeport Indonesia. Kestabilan kebijakan sangat penting bagi kelangsungan operasional perusahaan dan untuk memberikan kepastian bagi para investor. Risiko politik dan ketidakpastian yang mungkin timbul akibat perubahan kebijakan setelah pemilihan presiden dapat mengganggu perencanaan investasi jangka panjang perusahaan multinasional seperti Freeport-McMoRan. Dalam menghadapi masa depan, keberlanjutan bisnis dan stabilitas investasi harus tetap menjadi fokus utama dalam kebijakan yang diusulkan oleh para pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- “Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar | Indonesia Adil Makmur Untuk Semua”. (n.d.). Dipetik Desember 2023, dari <https://aminajadulu.com>
- Ayyubi, S. A. (2023, November 8). *Prabowo Ancam Investor Asing Jika Tak Mau Bangun Smelter di RI*. Diambil kembali dari Ekonomi Bisnis: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231108/9/1712407/prabowo-ancam-investor-asing-jika-tak-mau-bangun-smelter-di-ri>
- “Ganjar Pranowo - Mahfud MD | Menuju Indonesia Unggul.”. (n.d.). Dipetik Desember 2023, dari <https://visimisiganjarmahfud.id>
- Muliawati, F. D. (2023, Oktober 20). *Mau Nambah Saham di Freeport, Pemerintah Ngaku Lagi Negosiasi*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231020190224-4-482436/mau-nambah-saham-di-freeport-pemerintah-ngaku-lagi-negosiasi>
- “Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka | Bersama Indonesia Maju.”. (n.d.). Dipetik Desember 2023, dari <https://prabowogibran2.id>
- Puspadini, M. (2023, Desember 11). *Anies Baswedan: Asing Tahu Kondisi Kita, Gak Bisa Bohong!* Dipetik Desember 2023, dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231211144341-4-496195/anies-baswedan-asing-tahu-kondisi-kita-gak-bisa-bohong>
- Rahayu, I., Barkah, C. S., & Novel, N. J. (2022, Januari). Studi Kasus Analisis Proses Negosiasi PT. Freeport dengan Pemerintah Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/357801062_STUDI_KASUS_ANALISIS_PROSES_NEGOSIASI_PT_FREEPORT_DENGAN_PEMERINTAH_INDONESIA
- Ramadhani, A. N. (2022). Kajian Kasus Freeport Sebagai Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Menggunakan Pendekatan Neomarxisme. https://www.researchgate.net/publication/371681103_Kajian_Kasus_Freeport_Sebagai_Ketimpangan_Pendapatan_di_Indonesia_Menggunakan_Pendekatan_Neomarxisme
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.